

# Sosialisasi BOS dan Jamkesmas Lemah



**BAWAKAN MATERI:** Pemateri dari Dinas Pendidikan, Lanahar Laoca saat memaparkan materi, didampingi pemateri dari Dinas Kesehatan dr.Ferawati, pada seminar di Tanjung Karang, kemarin.

SUDIRMAN

## LPS-HAM Paparkan Temuan Riset CRC

**DONGGALA** - Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Manusia (LPS-HAM)

dengan Kemitraan Partnersip, Kamis (15/9) kemarin, menggelar seminar hasil riset Citizen Report Card (CRC) terkait program yang diberikan oleh pemerintah program Dana BOS dan Jamkesmas bagi masyarakat Kabupaten Donggala.

Seminar itu, berlangsung di Toravega Cottage, kompleks

Wisata Tanjung Karang, Kabupaten Donggala. Hadir pada saat itu, perwakilan dari Pemkab Donggala diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, anggota DPRD, Rumah Sakit Kabelota dan Puskesmas



# Pengetahuan Masyarakat Sudah Membaik

## ■ Sosialisasi...

Sambungan dari hal...16

Donggala.

Sekjen LPS-HAM Muslimin memaparkan beberapa temuan riset CRC, yang dilakukan selama 10 bulan sejak Oktober 2010 hingga Juli 2011, di tiga wilayah di Kabupaten Donggala yang dipilih secara acak terkait program BOS dan Jamkesmas yang diberikan oleh Pemkab Donggala.

Katanya, hasil Riset Metodologi CRC yang digunakan seperti wawancara mendalam, fokus group diskusi dan penyebaran koisioner, menemukan masih adanya beberapa kendala dan keluhan masyarakat Kabupaten Donggala, seperti masih lemahnya sosialisasi dari Pemkab Donggala terkait program Dana BOS dan Jamkesmas yang membuat ketidaktahuan masyarakat akan program itu.

Selain itu, prosedur program BOS dan Jamkesmas kurang dipahami oleh masyarakat. "Masih banyak masyarakat yang tidak memahami dengan program ini, bukan hanya itu kami menemukan masih ada juga pasien yang sudah mendapatkan Jamkesmas tetapi masih terbebani masalah biaya. Akibat pelayanan yang diberikan tidak sesuai program Jamkesmas. Begitu juga

dengan dana BOS ternyata dalam pengimplementasiannya masih lemah, sehingga masih banyak siswa dikenai biaya pungutan yang sifatnya untuk operasional sekolah," ujarnya menjelaskan.

Muslimin menambahkan, LPS-HAM menyimpulkan pendapat beberapa responden beragam pekerjaan seperti nelayan, petani, buruh, tenaga honorer, URT, dan lainnya bahwa program Jamkesmas sudah cukup baik, karena pengetahuan tentang program sudah baik. Namun masih adanya peserta yang belum mengetahui haknya yang dikhawatirkan akan berdampak pada lemahnya pengawasan dan munculnya penyalahgunaan oleh petugas maupun unit layanan kesehatan.

Begitu juga dengan program Dana BOS, lanjut Muslimin, pengetahuan masyarakat tentang itu sudah membaik. Namun hasil riset, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat hanya tentang informasi dasar saja. "Informasi tentang bantuan yang dijamin oleh dana BOS masih banyak belum diketahui secara pasti oleh masyarakat," tandasnya.

Kata dia, melalui seminar itu diharap memberi masukan kepada Pemkab Donggala, agar memberikan pelayanan kesehatan dan

pendidikan lebih transparan dan terbuka sesuai dengan UU KIP. Tujuannya, untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, terhadap adanya unsur yang sifatnya menyimpang dari program pemerintah, seperti perilaku Korupsi "LPS-HAM mengharapkan, Pemkab Donggala bisa memperbaiki layanan publik di sektor pendidikan melalui dana BOS dan di sektor kesehatan seperti informasi dan pemberian Jamkesmas," tandasnya.

Terkait masalah keluhan masyarakat akan pelayanan Jamkesmas dan Dana BOS, pemateri dari Dinas Kesehatan Donggala, dr Ferawati mengungkapkan, Dinas Kesehatan Donggala akan lebih berupaya memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur Jamkesmas. "Kami akan melakukan konsultasi lebih mendalam kepada Kepala Polindes, Puskesmas, bahkan Rumah Sakit, akan pelayanan Jamkesmas untuk masyarakat," ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh pemateri dari Dinas Pendidikan, H Lanahar Laoca yang mengaku, terus melakukan Sosialisasi kepada pihak sekolah terkait penggunaan dan manfaat adanya dana BOS, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. (edy)